



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 409 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR 18 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu merencanakan penyusunan peraturan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

b. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan kedua karena adanya penambahan rancangan Peraturan Bupati berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	

Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025.
- KESATU : Merubah kedua kali Keputusan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Kabupaten Mamuju Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan kedua Propemperkada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan penambahan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bupati dalam hal perintah Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Propemperkada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
3. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
5. Kabag Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 409 TAHUN 2025
TANGGAL 14 Agustus 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	POKOK MATERI	STATUS		PELAKSANAAN/DASAR HUKUM	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peraturan Bupati	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Bab I Ketentuan Umum Bab II Laporan Realisasi Anggaran Bab III Penjelasan Lampiran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Bab IV Penjabaran Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Bab V Penjelasan Lampiran Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Bab VI Ketentuan Penutup Ringkasan	Baru		1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2025
2	Peraturan Bupati	Standar Harga dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026	a. Standar harga; dan b. Analisis Standar Biaya.	Baru		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	BPKAD	2025

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	

						2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.		
3	Peraturan Bupati	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Bab I Ketentuan Umum Bab II Ringkasan APBD Bab III Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Bab IV Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Bab V Penjabaran Anggaran Pembiayaan Daerah Bab VI . Selisih Pendapatan daerah dengan Belanja Daerah & Pembiayaan Netto Bab VII Penjabaran Lampiran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bab VIII Penjelasan Lampiran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bab IX Penjelasan Pelaksanaan Penjabaran APBD Bab X Ketentuan Penutup	Baru		1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2025
4	Peraturan Bupati	Penjabaran Perubahan Anggaran	Bab I Ketentuan Umum	Baru		1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang	BPKAD	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	



		Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025	Bab II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bab III Penjabaran Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bab IV Penjelasan Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bab V Penjelasan Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Bab VI Ketentuan Penutup			Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.		
5	Peraturan Bupati	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta	Pokok Materi yakni merubah Pasal 317, Pasal 323, Pasal 326, Pasal 328, Pasal 330 dan mengapus Pasal 324, Pasal 325, Pasal 327, Pasal 329.		Ubah	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan	1. DPMPTSP 2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3. Bapperida 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Kesbangpol	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



		Tata Kerja Perangkat Daerah				dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.		
6	Peraturan Bupati	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Materi rancangan Peraturan Bupati ini pengaturan pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah.	Baru		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	INSPEKTORAT DAERAH	2025
7	Peraturan Bupati	Pedoman Audit Kinerja Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Materi rancangan Peraturan Bupati ini sebagai acuan untuk melaksanakan audit yang berbasis kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017	INSPEKTORAT DAERAH	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum

[Signature]

						tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		
8	Peraturan Bupati	Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Di Lingkungan Inspektorat Daerah	Materi rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi intern pemerintah pada Inspektorat Daerah.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Inspektorat Daerah	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



9	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Materi rancangan Peraturan Bupati ini pengaturan mengenai kewajiban dan tata cara penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Inspektorat Daerah	2025
---	------------------	---	---	------	--	---	--------------------	------

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum

tf

						3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.		
10	Peraturan Bupati	Pedoman Audit Investigasi di Lingkup	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini:	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana	Inspektorat	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	

f

		Inspektorat Daerah	a. Pedoman umum audit investigasi; dan b. Pedoman teknis audit investigasi.			telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.		
11	Peraturan Bupati	Pedoman Pemberian Keterangan Ahli di Lingkup Inspektorat Daerah	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. pedoman umum pemberian keterangan ahli; dan b. pedoman teknis pemberian keterangan ahli.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Inspektorat Daerah	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum

[Signature]

						2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.		
12	Peraturan Bupati	Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Di Lingkup Pemerintah Daerah	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Pedoman pengendalian kecurangan di lingkup Pemerintah Daerah	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Inspektorat Daerah	2025
13	Peraturan Bupati	Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Di Lingkup	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Pedoman Penghitungan kerugian keuangan Negara Di Lingkup Pemerintah Daerah	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	Inspektorat Daerah	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



		Pemerintah Daerah				dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.		
14	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini yaitu mengubah beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016	Inspektorat Daerah	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



						tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan endahara atau ejabat Lain. B P		
15	Peraturan Bupati	Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi	Pokok materi Rancangan Peraturan Bupati yaitu Penetapan dokumen rencana kontigensi bencana gempa bumi	Baru		1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan	BPBD	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	

ff

						Penanggulangan Bencana. 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana		
16	Peraturan Bupati	Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini yakni : a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b. peningkatan kualitas pelaksanaan; c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.	DPMD	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



17	Peraturan Bupati	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut : a. Pengalokasian ADD; b. Pembagian ADD; c. Penggunaan ADD; d. Mekanisme penyaluran ADD; dan e. Pembinaan dan pengawasan.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	DPMD	2025
----	------------------	---------------------------------------	--	------	--	--	------	------

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



						tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.		
18	Peraturan Bupati	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum

[Signature]

19	Peraturan Bupati	Fasilitas Parkir	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini sebagai berikut: a. penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan; b. penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir; c. pengguna ruang milik jalan; d. penyediaan fasilitas parkir khusus; dan e. sarana parkir.	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perparkiran.	Dinas Perhubungan	2025
20	Peraturan Bupati	Satuan Ruang Parkir.	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan (mobil penumpang, bus/truck atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu satuan ruang parkir yang merupakan unit ukuran yang diperlukan untuk memarkir kendaraan menurut berbagai bentuk penyediaannya	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perparkiran	Dinas Perhubungan	2025
21	Peraturan Bupati	Penyelenggara, Petugas, dan Pengguna Jasa Parkir	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini : a. Hak dan kewajiban pengguna jasa parkir; b. petugas parkir;	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perparkiran	Dinas Perhubungan	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Kabag Hukum



			c. Tata cara ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak; d. Kerjasama penyelenggaraan parkir; e. Tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir; dan f. Standar pelayanan minimal parkir.					
22	Peraturan Bupati	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan g. penutup.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Bapperida	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag. Hukum



						menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		
23	Peraturan Bupati	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat: a. pendahuluan;		Ubah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan	Bapperida	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



			b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan kedua) tahun berkenaan; c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah; d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah; e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan f. penutup.			Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		
24	Peraturan Bupati	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	Pokok Materi rancangan Peraturan Bupati yaitu Penetapan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan sistematika sebagai berikut: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. tujuan dan sasaran; e. strategi dan arah kebijakan; f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana	Bapperida	2025

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	

			g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. penutup.			Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		
25	Peraturan Bupati	Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Daerah	Pokok Materi yaitu: a. penggunaan indikator kinerja utama; dan b. penetapan indikator kinerja utama.			1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Pendekatan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Bapperida	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



26	Peraturan Bupati	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini sebagai berikut : a. Tata kelola dan manajemen SPBE; b. Penyelenggara SPBE; c. Pemantauan dan evaluasi; dan d. Pendanaan.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2025
27	Peraturan Bupati	Tata Cara Pelaksanaan Pajak daerah	Materi muatan Peraturan Bupati ini : a. Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak. b. Tata cara pemungutan pajak	Baru		1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



28	Peraturan Bupati	Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Daerah	Materi muatan Peraturan Bupati ini: a. Tata cara pemungutan retribusi daerah b. Teknis operasional pemungutan	Baru		1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	2025
29	Peraturan Bupati	Besaran Perolehan Tanah Air	Materi muatan Peraturan Bupati ini mekanisme pengenaan Pajak Air Tanah	Baru		1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	2025
30	Peraturan Bupati	Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan	Materi muatan Peraturan Bupati ini mengatur mengenai mekanisme pemberian insentif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.			1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum

ft

31	Peraturan Bupati	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024	Materi muatan Peraturan Bupati ini yakni menetapkan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024	Baru		1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Negara Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	Dinas Perkebunan	2025
32	Peraturan Bupati	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit	Materi muatan Peraturan Bupati ini yakni membentuk Unit Pelaksana	Baru		1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat	PPPA	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum

ts

		Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak		
33	Peraturan Bupati	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan	Materi muatan Peraturan Bupati ini: a. tujuan penataan wilayah perencanaan;	Baru		1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali	Dinas PUPR	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



		Pariwisata Pesisir Barat Karampuang	b. rencana Strukur Ruang; c. rencana Pola Ruang; d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; e. peraturan zonasi; dan f. kelembagaan			diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		
34	Peraturan Bupati	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Aglomerasi Pendidikan Tinggi dan Pusat Penelitian	Materi muatan Peraturan Bupati ini: a. tujuan penataan wilayah perencanaan; b. rencana Strukur Ruang; c. rencana Pola Ruang; d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; e. peraturan zonasi; dan f. kelembagaan	Baru		1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	Dinas PUPR	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



						2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		
35	Peraturan Bupati	Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. remunerasi; b. pola remunerasi; dan c. komponen remunerasi.	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	RSUD	2025
36	Peraturan Bupati	Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. kebijakan tarif; b. kegiatan yang dikenakan tarif; c. komponen tarif; d. pola perhitungan tarif; dan e. besaran tarif layanan;	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	2025
37	Peraturan Bupati	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. tujuan; b. Pola Tata Kelola; c. Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Profesional Non ASN; d. remunerasi; e. standar pelayanan minimal; dan f. pembinaan dan pengawasan.	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	2025
38	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati	Mengubah beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun		Ubah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011	Dinas Perumahan	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum

f

		Mamuju Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju	2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju			tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011	Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju	
--	--	--	---	--	--	---	--	--

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



						tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.		
39	Peraturan Bupati	Tata Cara Pemberian, Penyaluran Biaya dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut: a. pemberian bantuan hukum; b. penyaluran biaya bantuan hukum; dan c. pelaporan pelaksanaan bantuan hukum.	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Bagian Hukum	2025
40	Peraturan Bupati	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut: 1. pengelolaan Rumah Potong Hewan; 2. tertib tuna wisma dan anak jalanan; 3. penertiban tempat hiburan dan keramaian; 4. ketertiban pasar dan pedagang kaki lima; dan	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Satpol PP dan Damkar	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum

(Signature)

		Umum Masyarakat	5. ketentuan jenis pelanggaran.					
41	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati merubah: 1. Pasal 5 mengenai besaran Alokasi Dana Desa; 2. Pasal 17 mengenai besaran Alokasi Dana Desa pada setiap desa yang tercantum dalam lampiran.		Ubah	Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.	Dinas Perumahan rakyat, Kawasan permukiman, dan Pertanahan	2025
42	Peraturan Bupati	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Materi pokok rancangan Peraturan Bupati yaitu : a. kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi; b. pemberdayaan koperasi; c. pembentukan satuan tugas; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; e. pembinaan dan pengawasan; dan f. pendanaan.	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	1. DPMD 2. Dinas Koperasi	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



						tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).		
43	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025	pokok materi rancangan Peraturan Bupati yaitu merubah lampiran Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025		Ubah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	BPKAD	2025
44	Peraturan Bupati Mamuju	Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Pokok Materi rancangan Peraturan Bupati yakni mengatur pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh Pengguna Data untuk mendukung perencanaan pembangunan Daerah melalui	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



			perbaikan tata kelola data pemerintahan Daerah			Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 2. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086).		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	

						3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).		
45	Peraturan Bupati Mamuju	Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer	Pokok Materi rancangan Peraturan Bupati yakni: a. Pelayanan Kesehatan Primer b. Sistem Jejaring Pelayanan Kesehatan c. Peran Lintas Sektor d. Pencatatan dan Pelaporan e. Pembinaan dan Pengawasan f. Pendanaan	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan	Dinas Kesehatan	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



						Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) 3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086).		
46	Peraturan Bupati Mamuju	Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati	Pokok Materi Rancangan Peraturan Bupati Mamuju sebagai berikut: 1. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 2. Penganggaran belanja penunjang operasional	Baru		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan	1. BPKAD 2. BAPENDA 3. Bagian Umum Setdakab Mamuju	2025

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kabag Hukum



			3. Pertanggungjawaban belanja penunjang operasional			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 2. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara		
--	--	--	---	--	--	--	--	--

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	f ₁
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	

						Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI